

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023



DISHANPAN

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Ungaran, 18 November 2022
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19661016 199203 2 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSNN.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan salah satu prioritas daerah berupa pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Tahun 2023 menjadi tahapan akhir dan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat sebagaimana hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada ketercapaian sepuluh (10) program unggulan daerah dan masukan DPRD dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga arah dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ditujukan guna mewujudkan “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”. Untuk DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah program dan kegiatan tahun 2023 difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah (SISLOGDA), pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, penanganan stunting, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar.

Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan beserta pengalokasian pagu indikatif yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Rancangan Renja DISHANPAN disusun dengan mempertimbangkan upaya akselerasi pencapaian target kinerja secara tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengutamakan belanja untuk masyarakat, efisiensi dan efektifitas pada belanja pendukung kegiatan serta memastikan *redliness criteria* kegiatan yang akan dilaksanakan. Renja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah untuk mekanisme perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan Renja, meliputi: 1) Penggalian masalah dan potensi; 2) Pembahasan lingkup Dinas Ketahanan Pangan; 3) Pembahasan bersama pakar; 4) Verifikasi awal oleh Bappeda; 5) Forum Perangkat Daerah.

12. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjabarkan rencana strategis DISHANPAN ke dalam rencana operasional tahun 2023;
- b. Menjaga konsistensi capaian target kinerja program/kegiatan dan standar pelayanan minimal DISHANPAN tahun 2023 dengan Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023.
- c. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pangan.
- d. Menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPS, RAPBD dan APBD tahun 2023.

2 Tujuan

- a. Memberikan landasan operasional dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2023;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023;
- c. Mewujudkan konsistensi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan provinsi tahun 2023 dengan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Bab ini memuat rewiu evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pangan; rewiu terhadap rancangan awal RKPD serta telaah usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Bab ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan program Peningkatan Ketahanan Pangan. Berdasarkan matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah terdiri dari empat belas (14) indikator kinerja outcome hasilnya empat (4) indikator tercapai 100% yaitu: persentase cadangan pangan yang dikelola, rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan, presentase penanganan daerah rawan pangan dan presentase pengawasan keamanan pangan segar serta sepuluh (10) indikator melebihi target meliputi: *Coefficient of Variation* (CV) harga pangan strategis bawang merah, CV harga pangan strategis beras, CV harga pangan strategis cabai, ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas, ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas, konsumsi kelompok pangan buah dan sayur, konsumsi kelompok pangan hewani, konsumsi pangan beras, persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan, dan rasio konsumsi pangan lokal.

Realisasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 mengacu pada APBD 2021 secara terinci dituangkan pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah serta realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD yang secara rinci dituangkan dalam Tabel 2.2. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 terdiri dari 9 kegiatan, 31 sub kegiatan dan 54 indikator sub kegiatan dengan realisasi kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keselaran proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan serta dilakukannya pemantauan secara rutin menjadi salah satu faktor tercapainya kinerja hasil/keluaran sesuai target yang telah ditetapkan. Dan adapula beberapa kinerja hasil/keluaran yang dicapai melebihi target, antara lain disebabkan oleh 1). meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); 2) meningkatnya kesadaran pengusaha pangan segar asal tumbuhan untuk mendaftarkan produknya untuk mendapat registrasi PSAT; 3) meningkatnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola pemerintah dan; 4) meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal. Terdapat satu (1) indikator sub kegiatan yang belum mencapai target, yaitu pada indikator CPP yang disediakan (99%) yang disebabkan oleh gagal lelang dalam pengadaan beras, sehingga terdapat sisa mati dari lelang pertama. Upaya yang perlu dilakukan adalah percepatan pengadaan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100
45	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			2	2	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun			2	2	100
46	Kegiatan Administrasi Keuangan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*						
47	Kegiatan Administrasi Umum						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor*	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran			12	12	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas*	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas*	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah			12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			1	1	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab			4	4	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah			34	34	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah			6	0	0
48	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*				0	0	0
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar			15	15	100
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas			88	98,17	111,56
		Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas			3.735	3.736	100,03
		Persentase cadangan pangan yang dikelola			100	100	100
		CV harga pangan strategis bawang merah			27	9,47	285,11
		CV harga pangan strategis cabai			42	17,01	246,91
		CV harga pangan strategis beras			5	0,57	877,19
		Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan			0,6	6,81	1.135%
		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur			85	86,88	102,21
		Konsumsi pangan beras			98,5	88,48	111,32
		Konsumsi kelompok pangan hewani			32	33,51	104,72
		Rasio konsumsi pangan lokal			0,13	0,16	123,08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
	Sub Kejiata Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan*	Jumlah rekomendasi yang disusun			1	1	100
		Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah)			1	1	100
		Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center			1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian			5	5	100
		Jumlah dokumen data KP2LB/LP2B					
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya*	Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah			1	1	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan*	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)			35	35	100
50	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi*	Jumlah CPP yang disediakan (beras)			200	198	99
		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi			40	40	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)*	Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan			130	130	100
		Analisa PPH			1	1	100
		Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan			16	16	100
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi			69	69	100
		Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi			2	2	100
		Data potensi pangan lokal			1	1	100
		Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan			3	3	100
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan			80	98,69	123,36
		Persentase pengawasan keamanan pangan segar			90	90	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif)			200	200	100
		Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar			1	1	100
		Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan			12	12	100
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan			200	200	100
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi*	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan			30	30	100
	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah sertifikat yang diterbitkan			7	29	414,29
		Jumlah register yang diterbitkan			53	89	167,92
		Surveilen jaminan mutu pangan			10	16	160
		Jaminan mutu pangan lainnya			3	3	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan*	Jumlah sampel pangan yang diuji			150	443	295,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah rekomendasi hasil uji			150	443	295,33
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan			85	85	100
53	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi*	Jumlah desa yang diberdayakan sebagai upaya penanganan kerawanan pangan			44	44	100
		Peta SKPG dan atau FSVA			1	1	100
	Program: Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12	24			
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	24			
3	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	24			
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	24			
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	24			
6	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	1	1			
7	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	1	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	24			
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	24			
10	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	24			
11	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	24			
12	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	24			
13	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	24			
14	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	24			
15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	24			
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	24			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	24			
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	24			
19	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5	6			
20	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	6	5			
21	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2	2			
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	100	0			
23	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	30	30			
24	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12	12			
25	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran	12	12			
26	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12	12			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
27	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	2			
28	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang Disusun	2	2			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						
29	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Jumlah rekomendasi yang disusun	0	0			
30	Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian	0	0			
		Tersedianya data KP2LB/LP2B (Jateng)	0	0			
31	Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan	Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	1	1			
		Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah)	5	5			
32	Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan	Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	0	0			
		Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	0	0			
		Jumlah percontohan usaha petani berbasis korporasi	0	0			
		Promosi Produk Pertanian	0	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA	Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan	145	130			
		Analisa PPH	1	1			
		Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan	20	14			
34	Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Data potensi pangan lokal	1	1			
		Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi	2	2			
		Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi	70	55			
35	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan	11	8			
36	Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan	12	12			
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	600	600			
37	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif)	500	500			
		Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	12	12			
38	Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan	50	40			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan	34	34			
		Peta SKPG dan atau FSVA	1	1			
40	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah CPP yang disediakan (beras)	200	200			
		Jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi	120	80			
41	Pengujian Mutu Pangan	Jumlah sampel pangan yang diuji	75	75			
		Jumlah rekomendasi hasil uji	75	75			
42	Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	7	7			
		Jumlah register yang Diterbitkan	58	52			
		Jaminan mutu pangan Lainnya	9	7			
		Surveilen jaminan mutu pangan	21	18			
42	Analisis Ketersediaan Bahan Pangan	Jumlah rekomendasi yang disusun	1	1			
43	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian	5	5			
		Jumlah dokumen data KP2LB/LP2B	1	1			
44	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)	Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	1	1			
		Jumlah Kelompok yang dffasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	105	70			

Keterangan :

*) Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Tabel 2.2
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	80
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	80
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	80
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun*	23	2	2	50
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6	2	10	80
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	17	2	8	80
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pentatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan*	12	2	2	50
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	12	12	12	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Pentatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD*	4	1	1	50
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	0	120	220	80
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/ Workshop/ Seminar		15	105	80
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah*	12	12	12	50
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	30	25	59	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	6	5	5	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah*	12	12	12	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor*	12	12	24	66,6
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor*	12	12	24	66,6
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*	12	1	1	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	48	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	48	80
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12	12	12	50
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor*	12	12	12	50
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12	12	12	50
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional*	12	12	12	50
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung yang direhab	2	2	12	80
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung yang direhab*	1	1	1	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor*	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor*	12	12	48	80
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah*	12	12	48	80
B	PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	4.020	3.731	3.732	80
		CV harga pangan strategis (beras)	2	4,9	4,8	80
		Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	1	0,61	0,67	80
		Angka Konsumsi Beras*	91,4	92,3	92,3	50
8	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi*	0	10	10	50
		Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan*	2	2	2	50
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan*	5	5	5	50
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga*	5	5	5	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan*	2	2	2	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah informasi dan intervensi harga pangan strategis	4	4	25	80
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Jumlah Bibit/Benih Pangan Pokok Lokal Subsitusi Beras Yang Difasilitasi	0	5	18	80
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Data Pelaksanaan rantai Pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah (SISLOGDA)	1	1	3	80
		Fasilitasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	0	1	5	80
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Lokasi Pasar Mitra Tani yang difasilitasi*	0	6	6	50
		Kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	0	28	542	80
9	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Presentase peningkatan volume cadangan pangan*	3	3	3	50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian cadangan pangan provinsi	Jumlah CPP yang disediakan (Beras)	250	200	1.133	80
		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Difasilitasi	315	28	645	80
10	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Rasio konsumsi pangan lokal	0,15	0,14	0,14	80
		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	87	86	86	80
		Konsumsi kelompok pangan hewani	34	33	33	80
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pengembangan pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi*	28	25	25	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Promosi dan edukasi pangan B2SA yang dilaksanakan*	4	3	3	50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang di fasilitasi	37	30	2.459	80
		Analisa PPH	1	1	5	80
C	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan*	80	80	80	50
		Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan*	80	80	80	50
11	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kemanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi*	10	10	10	50
		Persentase PSAT teregistrasi di peredaran*	23	23	23	50
		Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi*	1	1	1	50
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi*	83,5	83	83	50
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium*	70	70	70	50
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kajian hasil pengawasan keamanan pangan segar	2	2	35	80
		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	300	250	1.630	80
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	250	225	1.825	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah kelompok / pelaku usaha yang dibina dalam penerapan hygiene sanitasi	25	20	152	80
	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan sertifikasi dan registrasi*	35	35	35	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sampel pangan yang diuji	70	60	1.064	80
		Dukungan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Laboratorium BPMKP*	0	0	0	0
D	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase penurunan daerah rawan pangan*	1	1	1	50
12	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prosentase penanganan daerah rawan pangan*	4,91	4,45	4,45	50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Desa mandiri Pangan yang difasilitasi	34	30	899	80
		Peta SKPG dan atau FSVA	1	1	6	80

Keterangan :

*) Penyesuaian Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja pelayanan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Tahun 2018 – 2023. Hasil analisis tertuang pada Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data Tabel 2.3. dapat dilihat tingkat pencapaian target kinerja DISHANPAN untuk seluruh indikator kinerja program outcome. Hasil evaluasi kinerja pelayanan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Renja DISHANPAN Tahun 2023.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas (kkal/kapita/hari)		4.020	4.010	4.015	4.020	3.736	3.731	4.020	4.020	
5	Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas (Gram/kapita/hari)		107,8	107,4	-	-	98,17	-	-	-	Dihapus karena penyesuaian dengan Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019
6	CV harga pangan strategis beras (%)		5	5	4,9	4,8	0,57	4,9	2	2	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	CV harga pangan strategis bawang merah (%)		25	27	-	-	9,47	-	-	-	Dihapus karena penyesuaian dengan Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019
8	CV harga pangan strategis cabai (%)		40	42	-	-	17,01	-	-	-	Dihapus karena penyesuaian dengan Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019
9	Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan (angka)		1	0,77	-	-	6,81	-	-	-	Diganti Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan
10	Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan		1	-	0,61	0,67	-	0,61	1	1	Pengganti no. 9
11	Persentase cadangan pangan yang dikelola (%)		100	100	-	-	100	-	-	-	Dihapus karena merupakan indikator kegiatan
12	Rasio konsumsi pangan lokal (angka)		0,15	0,13	-	-	0,16	-	-	-	Dihapus karena merupakan indikator kegiatan
13	Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (kg/kapita/ tahun)		87	85	-	-	86,88	-	-	-	Dihapus karena merupakan indikator kegiatan
14	Konsumsi kelompok pangan hewani (kg/kapita/ tahun)		34	32	-	-	33,51	-	-	-	Dihapus karena merupakan indikator kegiatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Konsumsi pangan beras (kg/kapita/ tahun)		97,8	98,5	-	-	88,48	-	-	-	Diganti Angka Konsumsi Beras
16	Angka Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)		97,8	-	92,3	91,4	-	92,3	91,4	91,4	Pengganti no.15
17	Persentase pengawasan keamanan pangan segar (%)		90	90	-	-	90	-	-	-	Diganti Presentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan
18	Presentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)		90	-	80	80	-	80	80	80	Pengganti no. 17
19	Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan (%)		80	80	-	-	98,69	-	-	-	Dihapus karena merupakan indikator kegiatan
20	Presentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan (%)			-	80	80	-	80	80	80	Indikator baru karena penyesuaian dengan Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019
21	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)		85	85	-	-	85	-	-	-	Diganti Presentase penurunan daerah rawan pangan
22	Presentase penurunan daerah rawan pangan (%)		85	-	1	1	-	1	1	1	Pengganti no.21

Uraian capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Capaian target indikator ini adalah 100%. Upaya pencapaian target tersebut melalui 14 (empat belas) sub kegiatan pada sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan 9 (sembilan) sub kegiatan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 10) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - 14) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 8) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2. Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD

Capaian target indikator ini adalah 100% yang dilakukan melalui 2 (dua) sub kegiatan. *Pertama*, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen dan tercapai 100%. Dokumen perencanaan yang disusun meliputi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (RKPD) tahun 2022. *Kedua*, kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen dan

tercapai 100%. Dokumen evaluasi yang disusun meliputi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

3. CV Harga Pangan Strategis (Bawang merah, Beras dan Cabai)

Indikator program koefisien variasi harga di tingkat konsumen (CV) untuk harga pangan strategis (beras, cabai, bawang merah) dan target tercapai sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1. Koefisien variasi harga ditingkat konsumen (CV) merupakan salah satu tolok ukur stabilisasi harga, semakin kecil CV harga pangan maka semakin stabil harga pangan di tingkat konsumen. Capaian CV yang tersaji tabel 2.1. menunjukkan bahwa untuk harga pangan strategis beras, bawang merah dan cabai relatif stabil. Upaya pencapaian target dilakukan melalui Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan.

Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan dengan target kegiatan, yaitu: (i) Jumlah intervensi harga pangan strategis (beras, cabe, bawang merah) terealisasi sebanyak 4 kali dan (ii) Jumlah TTI Center yang difasilitasi dengan target 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit. Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar dapat terjangkau oleh masyarakat, maka dilakukan berbagai upaya meliputi koordinasi lintas sektor untuk pemantauan harga, ketersediaan, distribusi pangan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pemantauan dan pengumpulan informasi harga, pasokan dan akses pangan di tingkat produsen dan konsumen dilaksanakan secara rutin atau periodik untuk digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan terkait distribusi pangan mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah dan disajikan mingguan/bulanan. Selain itu dilakukan pula intervensi harga pangan komoditas strategis (beras, cabe, dan bawang merah) serta melalui Pasar Tani dan Toko Tani Center yang menyediakan dan menjual komoditas strategis tersebut dengan harga terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kestabilan harga.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) dengan target kegiatan, yaitu: (i) Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan

pokok serta sistem logistik daerah sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan; (ii) Jumlah kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada LDPM sebanyak 35 kelompok, terealisasi sebanyak 35 kelompok. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat dengan memperpendek rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta meningkatkan akses pangan masyarakat pada kondisi tertentu.

4. Ketersediaan Energi dan Protein Pangan Beragam dan Berkualitas
Capaian target ketersediaan energi yaitu 100,03% atau ketersediaan energi mencapai 3.736 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk capaian target ketersediaan protein yaitu 111,56% atau ketersediaan protein sebesar 98,17 gram/kapita/hari. Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan dan kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan.

Untuk kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan tercapai 100% melalui penyusunan 1 rekomendasi terkait ketersediaan bahan pangan (dalam bentuk energi, protein dan lemak) untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu di wilayah Jawa Tengah. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2021. NBM disusun setiap tahun yang mengacu pada metode dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada.

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan tercapai 100% yaitu melalui sosialisasi kegiatan pengembangan komoditas tanaman unggulan porang terhadap 5 kelompok untuk mendukung peningkatan ketersediaan energi dan diversifikasi pangan di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2021, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Batang, Temanggung, dan Karanganyar. Kelompok tersebut mendapatkan sosialisasi dan pelatihan stimulan pengembangan komoditas tanaman porang dalam upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan melalui pengembangan bahan pangan unggul lokal sebagai alternatif ketahanan pangan untuk mendukung peningkatan ketersediaan energi dan protein di Provinsi Jawa Tengah.

5. Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur serta konsumsi kelompok pangan hewani

Pencapaian target konsumsi kelompok pangan buah dan sayur yaitu 102,21% atau konsumsi konsumsi kelompok pangan buah dan sayur mencapai 86,88 kg/kapita/tahun. Sedangkan capaian target konsumsi kelompok pangan hewani yaitu 104,72% atau konsumsi kelompok pangan hewani sebesar 33,51 kg/kapita/tahun. Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Konsumsi Pangan B2SA. Untuk target kinerja kegiatan, yaitu: (i) Jumlah kelompok penerima stimulan benih/bibit tanaman, ikan unuk

optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang difasilitasi sebanyak 130 kelompok, tercapai sebesar 100%, dan (ii) Jumlah sekolah penerima stimulan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 16 paket, tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Bimbingan teknis Optimalisasi Pemanfaatan Peekarangan (OPP) bagi 130 kelompok penerima sebanyak 295 orang (pendamping kab/kota, pendamping kelompok, ketua kelompok afinitas) yang terbagi dalam 6 wilayah eks karesidenan secara daring, Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA di Desa Jlegong Kab. Temanggung, pendamping sekolah dan guru dan pemberian makan B2SA siswa/siswi yang dilakukan pada 16 Sekolah SD/MI di 13 Kabupaten dengan jumlah siswa/siswi yang mengikuti pemberian makan sebanyak 1.991 orang untuk jumlah pemberian makan keseluruhan sebanyak 64 kali makan.

6. Konsumsi Pangan Beras

Indikator program konsumsi beras dengan target sebesar 98,5 kg/kapita/tahun. Konsumsi beras selama tahun 2021 sebesar 88,48 kg/kapita/tahun dengan pencapaian target sebesar 111,32%. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi konsumsi beras, diimbangi dengan peningkatan konsumsi kelompok pangan lainnya.

Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan. Target kinerja kegiatan jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dapat tercapai sebanyak 3 kali sehingga pencapaian target sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Promosi diversifikasi olahan pangan lokal dengan tema kenyang tidak harus nasi dilakukan sebanyak 18 kali dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang diikuti oleh peserta dari 6 Kabupaten/Kota.

7. Persentase cadangan pangan yang dikelola

Capaian target tahun 2021 adalah 100%, upaya pencapaian target tersebut melalui kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat sub kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah dengan target kegiatan sebesar 200.000 kg beras terealisasi sebesar 331.800 kg GKG, jika diasumsikan tingkat rendemen gabah sebesar 60%, maka tersedia CPPD setara beras sebesar 189.126 kg, sehingga target 200.000 kg belum tercapai. Hal itu dikarenakan gagal lelang dalam pengadaan beras, sehingga terdapat sisa mati dari lelang pertama, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan percepatan pengadaan.

Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinator DISHANPAN mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, baik karena terjadinya bencana, anomali iklim, gagal panen, gejala

harga atau kemiskinan. Penyaluran bantuan CPP (beras) kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien pada tahun 2021 sebanyak 166.565 kg beras yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota dan masyarakat Jawa Tengah yang merantau di Jabodetabek serta luar Pulau Jawa.

8. Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan

Indikator program Persentase Jaminan Mutu Pangan yang diterbitkan dengan target sebesar 80% telah tercapai sebesar 98,69%. DISHANPAN melakukan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 3 dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah dilakukan sertifikasi, karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar). Tahun 2021, OKKP-D menerbitkan 89 nomor pendaftaran PSAT, 1 sertifikat Prima 2, 3 jaminan mutu pangan lainnya (selain PSAT dan Prima 3), serta 16 surveilen jaminan mutu pangan. Upaya pencapaian target tersebut melalui:

a. Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja kegiatan:

- 1) Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 29 sertifikat tercapai sebesar 414,29%.
- 2) Jumlah register yang diterbitkan sebanyak 89 sertifikat tercapai sebesar 167,92%.
- 3) Jumlah jaminan mutu pangan lain yang diterbitkan (selain PSAT dan Prima 3) sebanyak 3 sertifikat tercapai sebesar 100%.
- 4) Surveilen jaminan mutu pangan sebanyak 16 kelompok tercapai sebesar 160%.

b. Kegiatan Pengujian Mutu Pangan

Target kinerja kegiatan:

- 1) Jumlah sampel pangan yang diuji 150 sampel, realisasi sebanyak 443 sampel atau tercapai sebesar 295,33%
- 2) Jumlah rekomendasi hasil uji sebanyak 150 sampel, realisasi 443 sampel atau tercapai sebesar 295,33%.

9. Persentase penanganan daerah rawan pangan

Indikator program persentase penanganan daerah rawan pangan dengan target sebesar 85%, realisasi sebesar 85% atau tahap persiapan pada 8 Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami rawan pangan transien dan/atau kronis (Prioritas 1) dapat berjalan dengan baik dan pada akhir tahun 2022 dapat berkembang.

Upaya pencapaian target tersebut yaitu melalui kegiatan peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dan upaya untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program Desa Mandiri Pangan yaitu dengan pemberian stimulan ternak ayam kampung unggulan kepada 44 kelompok afinitas di 22 kabupaten.

10. Persentase pengawasan keamanan pangan segar

Indikator program persentase keamanan pangan segar dengan target 90% telah tercapai sebesar 90%. Pengawasan keamanan pangan di peredaran dilakukan oleh pengawas keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017) serta melibatkan instansi terkait dengan keamanan pangan di sepanjang rantai produksi pangan mengingat masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Melalui JKPD langkah semua *stakeholder* dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan. Tim juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara berkala terutama pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk penjaminan terhadap kualitas dan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat.

Upaya pencapaian target dilakukan melalui sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja kegiatan, yaitu (i) Jumlah sampel pangan segar yang aman yang diawasi (Kualitatif) sebanyak 200 sampel tercapai 100% dan (ii) Jumlah laporan kajian hasil pengawasan keamanan pangan segar sebanyak 1 dokumen tercapai 100% (iii) Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan sebanyak 12 dokumen, tercapai sebesar 100% dan (iv) Jumlah masyarakat yang tereduksi

tentang mutu dan keamanan pangan sebanyak 200 orang tercapai sebesar 100%, yang dilakukan di 5 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan peserta meliputi perwakilan dari Tim Penggerak PKK, Taruna Tani, KWT, guru, gapoktan yang diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang pangan yang aman dan bermutu melalui kegiatan ini, serta sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi dengan target kinerja jumlah kelompok yang dibina dalam pengembangan kelembagaan keamanan pangan sebanyak 30 kelompok tercapai sebanyak 30 kelompok (100%).

11. Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan

Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat dengan target sebesar 0,6 tercapai target sebesar 100%. Capaian rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat sebesar 0,6 yang dihitung dari jumlah stok cadangan pangan masyarakat dibagi kebutuhan cadangan pangan untuk 3 (tiga) bulan.

Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat sub kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat dengan target kegiatan jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi sebanyak 40 unit dan telah tercapai 100%.

12. Rasio konsumsi pangan lokal

Capaian target kegiatan ini adalah 123,08% atau rasio konsumsi pangan lokal sebesar 0,16 dari target 0,13. Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Target kinerja kegiatan jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi sebanyak 2 kelompok tercapai sebesar 100%. Kegiatan dilaksanakan untuk 2 kelompok di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Magelang dan Pati. Target kinerja kegiatan jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi sebanyak 69 kelompok tercapai sebesar 100%, yang dilaksanakan di 33 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan produk olahan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016, dan diubah dengan Pergub Jateng No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016. DISHANPAN mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antarwaktu dan antarwilayah;
2. Alur distribusi pangan belum efisien;
3. Penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam berbasis sumber daya pangan lokal;
4. Beragamnya jenis komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT;
5. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP dalam mendeteksi mutu dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat;
6. Kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana tidak terduga yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Kerawanan Pangan

Pangan sejatinya merupakan kebutuhan dasar bagi manusia didunia ini tidak luput juga di Indonesia. Menarik benang merah dari Ketahanan pangan, dalam hal aspek penentu utamanya adalah ketersediaan pangan. Tercapainya ketersediaan pangan dalam hal kualitas dan kuantitasnya merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan karena dapat mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat.

Ketersediaan pangan beras di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 pada estimasinya telah mencapai surplus kebutuhan beras, yaitu dari ketersediaan sebanyak 6.698.992 ton dengan kebutuhan hanya sebesar 3.231.669 ton. Tapi dalam prakteknya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan pangan dinilai masih kurang pada daerah-daerah tertentu. Hal tersebut terbukti pada peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Tahun 2021 terdapat sebanyak 31 Kecamatan Prioritas 1, 51 Kecamatan Prioritas 2, dan 107 Kecamatan Prioritas ke 3. Terdapat beberapa aspek yang menjadi indikator penyusunan Peta FSVA, yaitu:

I. Kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek ketersediaan pangan yang di turunkan lagi dalam butir-butir aspek yaitu:
 - a. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih “beras+jagung+ubi jalar+ubi kayu”.
- 2) Aspek akses terhadap pangan:
 - a. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan;
 - b. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran;
 - c. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
- 3) Aspek pemanfaatan pangan:
 - a. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 5 tahun;
 - b. Persentase rumah tangga akses ke air bersih;
 - c. Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk;
 - d. Persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (*Stunting*);
 - e. Persentase angka kesakitan.

II. Kerentanan terhadap kerawanan pangan transien (mendadak):

- 1) Bencana alam yang terkait iklim;
- 2) Variabilitas curah hujan;
- 3) Kehilangan produksi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu hadir dalam memberikan solusi penanganan Kerawanan pangan pada Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang akan menggunakan data-data strategis sebagai acuan penentuan CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) dengan menggunakan irisan antara Peta FSVA dan data DTKS, sehingga diharapkan untuk bisa mengintervensi desa-desa dengan kondisi rawan pangan dan desa yang berada dalam garis kemiskinan ekstrim khususnya di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah penanganan kerawanan pangan.

2. Ketersediaan Pangan

Produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif, namun tidak semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi di Provinsi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan seperti pada komoditas kedelai mengakibatkan kebutuhan kedelai dan produk turunannya sampai saat ini masih harus dipenuhi dari impor.

Surplus ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah melebihi jumlah kebutuhan beras masyarakat Jawa Tengah, namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, karena pola tanam padi yang sangat dipengaruhi oleh musim/cuaca, sehingga diperlukan pengelolaan stok beras agar pemenuhan kebutuhan beras dapat tercukupi sepanjang tahun.

Ketersediaan pangan berkaitan erat dengan lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, yang dalam lima tahun terakhir luas lahan pertanian di Jawa Tengah mengalami penyusutan. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi dengan upaya pengembangan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial, sehingga perlu dilakukan kajian terkait alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa Tengah sebagai pengawasan dan pemantauan agar tidak terjadi alih fungsi serta wujud komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan melalui pengembangan bahan pangan unggul lokal.

3. Cadangan Pangan

Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Keberadaan cadangan pangan ini dirasa cukup vital dalam mewujudkan kedaulatan pangan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan cadangan pangan ini diperlukan untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi secara terduga dan tidak terduga dengan lebih matang.

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gunung meletus dan lain sebagainya, merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Dengan adanya cadangan pangan diharapkan mampu mereduksi kelangkaan pangan yang terjadi di masyarakat.

4. Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) kenaikan harga pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*Volatile Foods*) karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik maupun internasional dan kondisi alam. Maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan yang bisa

menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Salah satunya adalah kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan yang mencakup intervensi harga yang perlu dilakukan guna mengatasi kelangkaan pangan, gangguan terhadap akses pangan serta gejolak harga pangan yang bisa terjadi karena faktor-faktor tersebut.

Belum tersedianya fasilitas serta sarana yang mendukung distribusi pangan, dikhawatirkan akan mengganggu akses fisik yang dapat memicu serangkaian kendala dilapangan. Seperti terjadinya kesenjangan harga pangan antar daerah dan mengganggu kestabilan harga pangan di masyarakat khususnya Provinsi Jawa Tengah. Mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang begitu vital dalam proses distribusi pangan, maka perlu adanya pemenuhan sarana dan prasarana dengan melihat kesesuaian kualitas dan kuantitasnya.

5. Konsumsi Pangan Masyarakat

Sampai saat ini pola konsumsi pangan masyarakat masih cenderung rendah karena kurangnya keberagaman jenis pangan dan keseimbangan gizinya. Hal ini ditunjukkan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Komoditas beras pada kenyataannya masih menjadi primadona dimasyarakat untuk urusan konsumsi sedangkan untuk konsumsi pangan sayur, buah, umbi-umbian kacang-kacangan serta protein hewani masih cukup rendah.

Hal ini tidak lepas dari keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang pangan dan gizi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dan maraknya industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peninngkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang pelaksanaannya tidak membedakan jenis kelamin dan berbasis keadilan bagi seluruh masyarakat diwilayah tersebut.

6. Keamanan Pangan Segar

Pangan Seagar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan atau penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

Keamanan pangan merupakan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mencegah pangan dari kemungkinan tercemar secara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Dewasa ini banyak beredar kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar yang perlu ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar sehingga diperlukan upaya untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

7. Jaminan Mutu dan Keamanan PSAT

Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 2, Prima 3, Rumas Kemas dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sertifikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah dilakukan sertifikasi, karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

Peningkatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia membawa dampak sosial-ekonomi yang besar diluar sektor kesehatan. Dampaknya multisektoral dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang yang berdampak bagi masyarakat miskin dan rentan. Saat ini cakupan kerugian yang ditimbulkan sulit untuk diantisipasi sepenuhnya. Sementara pemerintah tengah berupaya meredam masyarakat terkena dampak parah dari pandemi ini. Memantau dan menilai dampak sosial-ekonomi pandemi terhadap rumah tangga merupakan langkah pertama yang penting dan harus diambil untuk mengumpulkan data dan menghasilkan bukti guna membantu menanggulangi dampak tersebut. Penanganan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam mengatasi dampak covid-19 dapat dilakukan dengan memotong rantai distribusi yaitu mendekatkan konsumen dengan produsen dan membantu dalam pemasaran hasil produksi pertanian.

2. Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan

iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

3. Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, banjir pada lahan pertanian dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

4. Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Jawa Tengah juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Jawa Tengah untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas.

5. Permasalahan Gizi

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (*urban*) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet

yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan *overweight* dan obesitas.

6. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan pada Pemerintah Provinsi dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Jawa Tengah akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

7. Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Diterbitkannya Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan DISHANNPAN melalui OKKP-D dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

Beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu:

1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia yang dapat diberdayakan guna mendukung perwujudan kemandirian dan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan olahan lokal.
3. Potensi lembaga pertanian masyarakat yang bisa dikembangkan menjadi suatu badan usaha yang memiliki daya saing kuat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam yang dapat dikembangkan pada lahan pekarangan yang tidak produktif untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman.
5. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejak awal ditetapkannya Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan dibandingkan Analisis Kebutuhan yang pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana karena pada tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 membutuhkan penyesuaian target dan anggaran pada beberapa kegiatan sebagaimana pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Provinsi Jawa Tengah	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (kkal/kap/hari)	4.020	24.810.000	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Provinsi Jawa Tengah	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (kkal/kap/hari)	4.020	24.810.000	
			CV Harga Pangan Strategis (beras)	2 %				CV Harga Pangan Beras	2		
			Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	1				Rasio Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan	1		
			Angka Konsumsi Beras (kg/kap/th)	91,40				Angka Konsumsi Beras (Kg/Kap/Hari)	91,4		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Provinsi Jawa Tengah	Persentase PSAT yang Memenuhi syarat Keamanan dan mutu pangan (%) Cadangan	80	2.470.000	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Provinsi Jawa Tengah	Persentase PSAT yang Memenuhi syarat Keamanan dan mutu pangan (%)	80	2.470.000	
			Presentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan (%)	80				Presentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan (%)	80		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Provinsi Jawa Tengah	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan (%)	1	2.900.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Provinsi Jawa Tengah	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan (%)	1	2.900.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Presentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (%)	100	23.641.259	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Presentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (%)	100	23.641.259	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		
			Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100				Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu dasar penetapan alokasi kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, adalah usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan usulan sektoral pangan dari kabupaten/kota.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	315 Kelompok	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang difasilitasi	37 Kelompok	
			Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi	28 Kelompok	
3	Penanganan Kerawanan Pangan/Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah desa mandiri pangan yang difasilitasi	34 Desa	
4	Program Keamanan Pangan/Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan hygiene sanitasi	25 Kelompok	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Tema RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” untuk menuju Visi “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Pembangunan Nasional diarahkan pada: 1) Pembangunan Manusia; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Kewilayahan; 4) Pembangunan Infrastruktur; dan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Penyusunan program dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *money follow program*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatkan tata kelola organisasi PD, dengan indikator tujuan Nilai SKM dan meningkatkan ketahanan pangan, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan PD dengan indikator sasaran Nilai SKM, Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, dan Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas dengan indikator sasaran Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi). Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD		Nilai SKM	Angka	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	Angka	76
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP	Angka	80,02
2	Meningkatkan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,8
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka Konsumsi Energi	kcal/kapita /hari	2.100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Renstra DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang memuat program dan kegiatan dalam rangka menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh DISHANPAN pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pemerintah bidang pangan) dengan total Pagu Anggaran Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 53.821.259.000. Program yang dimaksud adalah:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 24.810.000.000,-
 - b. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp 2.470.000.000,-.
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp 2.900.000.000,-.
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 23.641.259.000,-.
- Rincian kegiatan untuk masing-masing program diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendaan Perangat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaan		Unit Kerja Perangat Daerah	Lokasi		
												2023					
												TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								31.582.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
													Angka	88,8	31.582.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
												kkal/kapita /hari	2100	31.582.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
														1.402.000.000			
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawailan dan keuangan Perangat Daerah					%	100	1.402.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		
				XXX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah esada Perangat Daerah							40.000.000			
							Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangat Daerah					Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				XXX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							40.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah				Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.06			Administrasi Umum Perangat Daerah							1.074.000.000			
							Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangat Daerah				Bulan	12		1.074.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				XXX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							12.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1.000.000.000			
							Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor				Unit	6		1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							12.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangat Daerah				Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				XXX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							5.000.000			
							Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor				Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							5.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangat Daerah				Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.06.08			Fasilitas Kuniunean Tamu							10.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu				Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							30.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							218.000.000			
							Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	12		218.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				XXX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat							3.000.000			
							Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangat Daerah				Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							95.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangat Daerah				Bulan	12		95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							120.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				Bulan	12		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70.000.000			
							Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	12		70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				XXX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							50.000.000			
							Jumlah Unit Gedung yang direhab				Unit	1		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				XXX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							20.000.000			
							Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor				Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				2.09.03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							24.810.000.000			
							Angka Konsumsi Beras						kg/kapita/t tahun	91,4	2.925.000.000	Bidang Konsumsi dan Pengangkutan Pangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
												Target	2023				
													Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				2.09.03.1.04			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi							2.925.000.000			
				2.09.03.1.04.01			Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur		Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		kg/kapita/tahun	87	500.000.000		SEKSI PROMOSI PENGENEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		
										Jumlah Promosi dan Edukasi Pangan B2SA yang dilaksanakan	Kali	4	500.000.000		SEKSI PROMOSI PENGENEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				2.09.03.1.04.02			Konsumsi kelompok pangan hewani		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		kg/kapita/tahun	34	1.225.000.000		SEKSI KONSUMSI PANGAN		
										Analisa PPH	Laporan	1	25.000.000		SEKSI KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
										Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang di fasilitasi	Kelompok	37	1.200.000.000		SEKSI KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				2.09.03.1.04.01			Rasio konsumsi pangan lokal		Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Angka	0,15	1.200.000.000		SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL		
										Jumlah kelompok pengembangan pangan diarah lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Kelompok	28	1.200.000.000		SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
						CV harga pangan strategis (beras)					%	2	2.775.000.000		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan		
				2.09.03.1.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							2.775.000.000			
				2.09.03.1.01.03			Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga				%	5	2.150.000.000		SEKSI DISTRIBUSI PANGAN		
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2.150.000.000			
				2.09.03.1.01.05						Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah Fasilitas Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Laporan	1	2.150.000.000		SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
										Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Paket	0	-		SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
										Jumlah lokasi Pasar Mitra Tani yang difasilitasi	Lokasi	0	-		SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
										Kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Kelompok	0	-		SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				2.09.03.1.01.01			Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan				%	5	625.000.000		SEKSI HARGA PANGAN		
										Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				625.000.000			
										Jumlah informasi dan intervensi harga pangan strategis	Kali	4	625.000.000		SEKSI HARGA PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
				2.09.03.1.01			Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas				kkal/kapita/hari	4020	660.000.000		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		
				2.09.03.1.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							660.000.000			
				2.09.03.1.01.01			Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan					Laporan	2	325.000.000		SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	
										Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				325.000.000			
				2.09.03.1.01.02			Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi			Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan	Laporan	2	325.000.000		SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
										Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				335.000.000		SEKSI SUMBERDAYA PANGAN	
										Jumlah bibit/benih pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	Paket	0	335.000.000		SEKSI SUMBERDAYA PANGAN		
				2.09.03.1.02			Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan				Ton	1	18.450.000.000		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan		
										Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				18.450.000.000			
				2.09.03.1.02.01			Persentase peningkatan volume cadangan pangan				%	3	18.450.000.000		SEKSI CADANGAN PANGAN		
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi				18.450.000.000			
				2.09.04	PROGRAM PEMANGGIAN KERAWANNAN PANGAN					Jumlah Cadangan Pangan Provinsi yang disediakan (beras)	Ton	250	2.873.273.000		SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
										Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	315	15.576.727.000		SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG	
														2.900.000.000			
				2.09.04.1.02			Persentase penurunan daerah rawan pangan				%	1	2.900.000.000		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		
										Pengamanan Kerawanan Pangan Kerawanan Provinsi				2.900.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Prosentase penanganan daerah rawan pangan			%	4,91	2.900.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
				2.09.04.1.02.01					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				2.900.000.000		
									Jumlah desa mandiri pangan yang difasilitasi	Desa		34	2.845.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Peta SKPG dan atau FSVA	Laporan		1	55.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													2.470.000.000		
									Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan		%	80	1.120.000.000	Bidang Keamanan Pangan	
				2.09.05.1.01					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.120.000.000		
									Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	Laporan		1	345.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
				2.09.05.1.01.04					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				345.000.000		
									Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang		250	345.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
									Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi		%	10	350.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
				2.09.05.1.01.01					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi				350.000.000		
									Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan higiene sanitasi	Kelompok		25	350.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
									Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran		%	23	425.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				2.09.05.1.01.04					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				425.000.000		
									Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Laporan		2	25.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
									Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	sampel		300	400.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
									Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan		%	80	1.350.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan	
				2.09.05.1.01					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.350.000.000		
									Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium		Angka	70	670.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	
				2.09.05.1.01.05					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				670.000.000		
									Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana Laboratorium BPMKP	Paket		0	-	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
									Jumlah sampel pangan yang diuji	sampel		70	670.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
									Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi		Angka	83,5	680.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
				2.09.05.1.01.03					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				680.000.000		
									Jumlah Layanan sertifikasi dan registrasi	Sertifikat		35	680.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah													22.239.259.000	Dinas Ketahanan Pangan	
	Nilai Keuasan Masyarakat													Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah												
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
									Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	670.545.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				670.545.000		
									Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun						
				X.XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				320.545.000		
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen		6	320.545.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				X.XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		17	350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													21.568.714.000		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah													
			Nilai Keuasan Masyarakat												
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
									Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		%	100	21.568.714.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.427.514.000		
									Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah						
				X.XX.01.1.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.427.514.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
													16.692.514.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	2023		
													Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	16.692.514.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				X.XX.01.1.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				340.000.000		
				X.XX.01.1.02.03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	340.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
										Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	395.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						134.000.000		
				X.XX.01.1.03.02				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Bulan	12	134.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
				X.XX.01.1.03.06					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													34.000.000		
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	Laporan	4	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													231.600.000		
				X.XX.01.1.05.03				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Bulan	12	231.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan				231.600.000		
				X.XX.01.1.05.09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawalan perangkat daerah	Bulan	12	231.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang		-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													1.725.600.000		
				X.XX.01.1.06.01				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Bulan	12	1.725.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				735.000.000		
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	30	735.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													40.600.000		
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	40.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
													90.000.000		
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
													12.000.000		
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
													80.000.000		
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													525.000.000		
				X.XX.01.1.06.10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													20.000.000		
				X.XX.01.1.06.11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													198.000.000		
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan	12	198.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													1.066.600.000		
				X.XX.01.1.08.01				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Bulan	12	1.066.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000		
													12.000.000		
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													415.000.000		
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	415.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													639.600.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
												2022						
												Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan umum kantor	Bulan	12	639.600.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG		
													983.400.000					
				X.XX.01.1.09.02				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Bulan	12	983.400.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			347.500.000					
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	347.500.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG		
				X.XX.01.1.09.09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			555.900.000					
										Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	2	555.900.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG		
				X.XX.01.1.09.10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.000					
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	80.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG		
JUMLAH																53.821.259.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan DISHANPAN yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, Rencana Strategis DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Hasil Evaluasi Kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 serta penggalan masalah dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan salah satu prioritas daerah berupa pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana sehingga Rencana Kerja (Renja) DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 difokuskan pada kegiatan Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah (SISLOGDA), subsidi dan intervensi harga, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan stunting, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar.

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pengimplementasikan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.



DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Komplek Pertanian Tarubudaya
Jl. Gatot Subroto No. 1 Ungaran
Telp : (024) 6921972, Fax : (024) 6921997, Kode Pos : 50501
Email: dishanpan@jatengprov.go.id